

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi pada dua dasawarsa terakhir, khususnya diberbagai negara berkembang kian populer, baik pada tingkat wacana maupun aras gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia.

Secara etimologis, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentuk dari dua kata *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) di mana kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Dalam pengertian yang lebih luas, Philipp C. schmitter mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil-wakil mereka yang telah terpilih. (Rozak, 2015)

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Subtansi demokrasi adalah terjaminnya kemerdekaan rakyat untuk memilih pemimpin atau sistem politik formal secara bebas dan sekaligus untuk menjatuhkannya jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi.

Demokrasi merupakan nilai universal sebagai kehendak yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Secara sederhana demokrasi digambarkan sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Pada hakikatnya demokrasi diwujudkan untuk mencapai kemakmuran. Salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. (Chryshna, 2021)

Aspirasi merupakan suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan dimasa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan- tujuan tersebut. Arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang. Keinginan ini bisa berupa

peningkatan status individu maupun keinginan yang bersifat extreme, terlalu berani ataupun tidak wajar.

Aspirasi masyarakat adalah sejumlah gagasan atau ide berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan ada keterlibatan langsung dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Aspirasi masyarakat itu usulan dan harapan masyarakat yang tidak akan terwujud jika dari pemerintah sendiri tidak mengambil tindakan untuk mewujudkannya.

Pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa. Pemerintah desa merupakan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan kepentingan dan pemerintahan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan desa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu menjaga kehidupan demokratis desa menjadi tugas bersama antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Tugas utama pemerintah desa dalam menjaga otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi

pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan harapan baru bagi pemerintah desa dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian

besar aparat Pemerintah Desa, otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang Desa ini adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruangan kreativitas bagi aparatur desa dalam membangun dan mengelola desa.

Dominasi dari Pemerintah Kecamatan dalam penyusunan program pembangunan di tingkat desa kini telah dikurangi, sehingga program yang akan dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Widjaja dalam Sugiman (2018), dengan dipertegasnya Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan sosial dan budaya masyarakat

setempat, yakni membuka peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial

budaya setempat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dimaksud ialah mitra dari Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. (Sugiman, 2018)

Secara kelembagaan, perwujudan kehidupan demokrasi di desa melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Badan ini berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan desa serta menampung aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan kepala Desa, yang memiliki kedudukan sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Lembaga Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa dapat membuat rancangan peraturan desa bersama pemerintah desa dan ditetapkan menjadi peraturan desa ketika telah mendapatkan kesepakatan bersama.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peran utama dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi masyarakat nampaknya salah satu peran dari Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta masyarakat desa, maka para anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan dapat dicapai dengan maksimal.

Disinilah peran penting Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi sebagai bagian dari pemerintahan desa dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga pembangunan desa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif di tingkat Desa sekaligus wakil dari masyarakat Desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan idea atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa.

Selain itu kurangnya pembahasan dan rencana pelaksanaan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa, kurangnya Badan Permusyawaratan Desa berinteraksi dengan masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ditandai dengan yang lebih dominan dimata masyarakat adalah Kepala Desa. Serta Badan Permusyawaratan Desa kurang melakukan musyawarah desa di tandai dengan tidak adanya bukti tertulis hasil dari musyawarah tersebut. Selain itu tidak adanya peraturan desa yang tertulis hal tersebut menandakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa kurang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi, seharusnya Badan Permusyawaratan Desa harus bisa membuat dan mengajak masyarakat untuk mengeluarkan pendapat tersebut dikumpulkan serta dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga Badan Permusyawaratan Desa ditingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir itu belum bekerja secara maksimal dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Sehingga masyarakat desa bakung merasa belum puas, karena banyak yang masyarakat

inginkan dan wujudkan tidak tersalurkan sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat desa bakung tidak kunjung terwujud.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan peneliti diatas, maka peneliti menemukan permasalahan bahwa ada permasalahan didalam Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah *“Bagaimana interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir?”*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini *“Untuk Mengetahui Bagaimana Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.”*

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian yang bermanfaat dibidang Ilmu Politik khususnya mahasiswa jurusan ilmu politik. Sehingga Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian mengenai Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan serta memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu politik mengenai Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

E. Tinjauan Pustaka

Didalam suatu penelitian diperlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Peneliti Pertama, dari Wiwik Anggreini (2018) "*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Perahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang*" Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Dari hasil penelitian ini menjelaskan tentang kurangnya komunikasi antara BPD, Kepala Desa dan Masyarakat, sehingga masyarakat sulit menyampaikan aspirasinya

kepada BPD seperti dalam kasus pembuatan fondasi sungai, BPD kurang berperan aktif dalam pelaksanaannya hal ini disebabkan kurangnya musyawarah yang dilakukan antara BPD dengan masyarakat.

Sehingga permasalahan ini menjadi bukti bahwa pentingnya komunikasi dan musyawarah yang dilakukan BPD dengan masyarakat yang dapat dijadikan untuk mempererat hubungan antara BPD dan masyarakat agar timbul pemahaman dari BPD mengenai kebutuhan masyarakatnya. (Anggreini, 2018)

Peneliti Kedua, dari Fitrianiingsih Langoy (2016) "*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)*" Universitas Sam Ratulangi Manado. Dari hasil peneliti ini menjelaskan peran badan permusyawaratan desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di desa tumani selatan kecamatan maesaan menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat terlihat hanya menerima saja apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Selain itu peran dari BPD belum benar-benar maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan hal ini disebabkan dari kurangnya informasi dan kerjasama baik pemerintah desa BPD maupun masyarakat. (Langoy, 2016)

Peneliti Ketiga, dari Regy Hilman Pahlawan (2019) "*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat*"

Universitas Muhammadiyah Malang. Dari hasil peneliti ini menjelaskan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bantaran Kabupaten Probolinggo dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, hambatan yang dialami oleh BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat tidak adanya surat keterangan (SK) untuk kepengurusan BPD, tidak mengetahui tugas pokok dan fungsinya, lebih mementingkan pekerjaan sehari-hari dibandingkan di BPD. (Pahlawan, 2019)

Peneliti Keempat, dari Aunur Rafiq dan Muhamad Asrizal (2020) "*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun*" Universitas Karimun. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sungai asam kecamatan belat kabupaten karimun belum terlaksana dengan baik, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum bisa dirasakan masyarakat secara keseluruhan, karena BPD yang belum mengetahui tugas dan fungsinya sehingga apa yang disalurkan masyarakat terkait pembangunan tidak berjalan dengan baik. (Aunur Rafiq, 2020)

Peneliti Kelima, dari Panca Setyo Prihatin (2016) "*Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa*" Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penelitian ini menjelaskan Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting sebagai

perpanjangan tangan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. (Prihatin, 2016 Vol 2 Nomor 1)

Dari keseluruhan penelitian yang telah ditinjau berkaitan dengan Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, penelitian tersebut secara sefisik tidak meneliti tentang Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, adapun yang membedakannya adalah pada subjek penelitian, teori, dan metodeologi penelitian, maka dengan adanya penelitian mengenai Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian mengenai interaksi antara BPD dan masyarakat dalam proses penyerapan aspirasi di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu teori demokrasi representasi selain menggunakan teori demokrasi representasi peneliti juga menggunakan teori sistem politik untuk mengukur atau menganalisa terkait dengan Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

Dalam demokrasi Badan Permusyawaratan Desa ini adalah orang yang ditunjuk dan dipilih untuk mewakili rakyat ditingkat desa. Yang mana pemerintahan yang tidak mewakili rakyat tapi mewakili diri sendiri itu disebut diktator, pemerintahan yang hanya mewakili sekelompok orang tertentu disebut otoriter dan pemerintahan yang mewakili keluarga dikenal dengan sebutan dinasti.

Tapi didalam demokrasi pemerintahan harus mewakili rakyat sama halnya dengan *the representation government of the peoples* yaitu pemerintahan perwakilan rakyat, Badan Permusyawaratan Desa merupakan orang-orang yang dipilih masyarakat desa secara demokratis dan di pilih secara langsung oleh masyarakat untuk mewakili rakyat, mengawasi, menampung dan menyalurkan aspirasi, jadi inti demokrasi itu adalah Representasi yaitu perwakilan. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat.

Untuk persoalan dan pembahasan tentang hubungan atau interaksi antara badan permusyawaratan desa dengan masyarakat desa bakung bisa dikatakan sebagai suatu proses demokrasi. Dalam penelitian ini teori yang digunakan ialah teori Demokrasi Representasi dari Anthony H. Birch. Teori Demokrasi Representasi sendiri ialah mengenai tentang Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat.

Alasan penggunaan Teori Demokrasi Representasi dari Anthony H. Birch dan Teori Sistem Politik dari David Easton karena, peneliti melihat persoalan yang sama di desa bakung dengan teori Demokrasi Representasi

dan Teori Sistem Politik sehingga persoalan yang ada sangat relevan dengan menggunakan kedua teori ini, sehingga apa yang akan peneliti teliti ini sangat tepat apabila dianalisa dengan teori Demokrasi Representasi dan teori sistem politik untuk meneliti fenomena yang terjadi di Desa Bakung mengenai badan permusyawaratan desa dengan masyarakat belum berjalan semana mestinya.

1. Teori Demokrasi Representasi Anthony H. Birch

Anthony H. Birch mengemukakan bahwa Teori Perwakilan Atau Representasi digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki tugas yang diakui untuk membela atau memajukan kepentingan tertentu yang ditentukan oleh prinsipnya, duduknya seseorang di dalam lembaga perwakilan dipandang mewakili keseluruhan kehendak atau aspirasi orang yang memberikan mandat.

Konsep Perwakilan Menurut Anthony H. Birch mengutarakan bahwa terdapat lima konsep perwakilan:

- *Delegated Representation*, dalam konteks konsep ini seorang wakil rakyat adalah perantara (juru bicara) yang bertindak atas nama kelompok yang diwakilinya. Karena itu, para wakil yang berlaku sebagai perantara tidak diperkenankan untuk bertindak di luar kuasa yang memberi mandat.
- *Microcosmic Representation*, konsep ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan sifat-sifat antara mereka diwakili dengan diri sang wakil. Karenanya kebutuhan ataupun tuntutan wakil adalah juga kebutuhan mereka-mereka yang diwakili. Dalam konsep ini masalah kuasa dan

hal-hal yang harus dilakukan tidak pernah menjadi persoalan krusial antara wakil dan yang diwakili oleh karena kesamaan sifat yang dimiliki.

- *Symbolic Representation*, merupakan bentuk perwakilan yang hendak memperlihatkan bahwa mereka-mereka yang mewakili kelompok tertentu melambangkan identitas atau kualitas kelas atau golongan yang tengah diwakilinya. Dalam *symbolic representation* tidak dipersoalan juga mengenai masalah kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan.
- *Elective Representation*, konsep ini dianggap belum menggambarkan kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan wakil mereka, sehingga belum menjelaskan tentang hubungan antara wakil dengan pemilihnya.
- *Party Representation*, individu-individu dalam lembaga perwakilan merupakan wakil dari partai politik (atau konsisten) yang diwakilinya.

2. Teori Sistem Politik David Easton

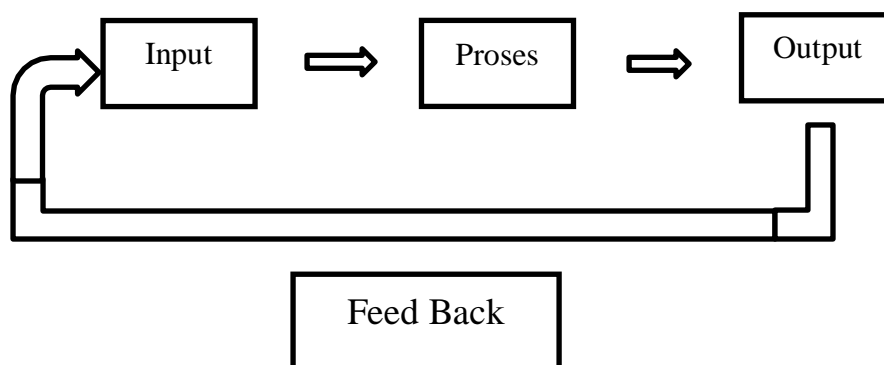
Teori sistem politik menurut David Easton, menurut David Easton teori sistem politik merupakan suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit (berupa masyarakat dan organisasi pemerintahan), David Easton juga meringkas ciri- ciri dari sistem politik sebagai berikut:

- Sistem mempunyai batas yang didalamnya ada saling hubungan fungsional yang terutama dilandasi oleh beberapa bentuk komunikasi.

- Sistem terbagi kedalam sub-sub sistem yang satu sama lainnya saling melakukan pertukaran (seperti antara pemerintah desa dengan BPD atau antara BPD dengan masyarakat).
- Sistem bisa membuat kode, yaitu menerima informasi, mempelajari dan menerjemahkan masukan (input) kedalam beberapa jenis keluaran (output).

David Easton mengemukakan bahwa Teori Sistem Politik digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem interaksi dimana David Easton memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem yang terdiri dari interaksi yang saling berkaitan. Interaksi itu menemukan hubungan-hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa interaksi itu mempengaruhi bagaimana keputusan otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sistem politik dari David Easton yang peneliti gunakan untuk melihat proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD. Karena, ini merupakan bagian dari sebuah sistem politik.

Bagan 1. Model Teori Sistem Politik David Easton



3. Indikator Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Oleh BPD

Lembaga perwakilan masyarakat untuk level ditingkat desa di Indonesia adalah BPD. BPD adalah representasi atau perwakilan masyarakat desa sehingga fungsi-fungsi representasi itu melekat pada BPD. Regulasi mengenai BPD di Indonesia ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, tugas BPD sebagai representasi masyarakat diatur didalam pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.

Berdasarkan pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Terkait dengan tugas BPD dalam penyerapan aspirasi masyarakat ada enam, yaitu :

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah desa

Dari setiap tugas BPD di dalam permendagri sudah di tetapkan teknis pelaksanaannya, teknis-teknis setiap pelaksanaan tugas yang kemudian menjadi indikator apakah BPD telah melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya atau tidak. Indikator dari berfungsi atau tidaknya BPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat

Dilaksanakan atau tidaknya tugas BPD dalam menggali aspirasi masyarakat dapat diukur dengan lima indikator, yaitu:

- a. BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- b. BPD menemui unsur-unsur masyarakat desa yaitu: lembaga yang ada dimasyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- c. Penggalian aspirasi masyarakat yang didasarkan pada keputusan hasil musyawarah BPD yang tertuang dalam agenda kerja BPD.
- d. Penggalian aspirasi masyarakat oleh BPD menggunakan panduan kegiatan yang memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- e. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

2. Menampung Aspirasi Masyarakat

Dilaksanakan atau tidaknya tugas BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dapat diukur dengan dua indikator, yaitu:

- a. Melaksanakan Kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- b. Mengadministrasikan aspirasi yang disampaikan dalam musyawarah BPD.

3. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Dilaksanakan atau tidaknya tugas BPD dalam mengelola aspirasi masyarakat dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu:

- a. BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- b. Pengadministrasian BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- c. Perumusan aspirasi oleh BPD dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

4. Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Dilaksanakan atau tidaknya tugas BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu:

- a. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan.
- b. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat kepada BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- c. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

5. Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Dilaksanakan atau tidaknya tugas BPD dalam penyelenggaraan musyawarah BPD dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu:

- a. Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- b. Hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

- c. BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
- musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - pemungutan suara sebagaimana dimaksud dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

6. Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Dilaksanakan atau tidaknya tugas BPD dalam penyelenggaraan musyawarah desadapat diukur dengan enam indikator, yaitu:

- a. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- b. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan musyawarah desa meliputi:
 - penataan Desa;
 - perencanaan Desa;
 - kerja sama Desa;
 - rencana investasi yang masuk ke Desa;

- pembentukan BUM Desa;
 - penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - kejadian luar biasa.
- d. Unsur masyarakat dalam penyelegaraan musyawarah desa terdiri atas:
- tokoh adat;
 - tokoh agama;
 - tokoh masyarakat;
 - tokoh pendidikan;
 - perwakilan kelompok tani;
 - perwakilan kelompok nelayan;
 - perwakilan kelompok perajin;
 - perwakilan kelompok perempuan;
 - perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- e. Selain unsur masyarakat musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- f. Musyawarah Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

4. Penggunaan Teori Demokrasi Representasi dan Teori Sistem Politik

Dalam Penelitian

Tahap pertama Peneliti akan turun lapangan untuk mencari data mengenai bagaimana Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung, setelah mendapatkan data dari lapangan peneliti akan menganalisisnya menggunakan Teori Demokrasi Representasi dari Anthony H. Birch, Teori Sistem Politik

dari David Easton dan dari Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.

Tahap kedua peneliti akan menjelaskan mengenai proses penyerapan aspirasi masyarakat desa dengan badan permusyawaratan desa. Dan hal itu sama dengan Teori Demokrasi Representasi yang menjelaskan tentang *the representation government of the peoples* yaitu pemerintahan perwakilan rakyat dan Teori Sistem Politik yang menjelaskan sistem interaksi BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat, karena badan permusyawaratan desa itu bagian dari badan perwakilan desa yang ditunjuk masyarakat untuk mewakili rakyat di tingkat desa.

Tahap ketiga setelah peneliti mendapatkan data mengenai Masyarakat dengan badan permusyawaratan desa peneliti akan memakai teori Demokrasi representasi dan teori Sistem Politik berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD yang diturunkan menjadi indikator-indikator untuk Menganalisa data yang diperoleh pada saat turun kelapangan dan menarik kesimpulan dari data yang telah didapatkan oleh peneliti.

Berdasarkan penjabaran mengenai teori Demokrasi Representasi dan teori Sistem Politik, penelitian yang berjudul Interaksi Antara Badan Permasyarakatan Desa Dan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir akan di teliti menggunakan teori Demokrasi Representasi, Teori Sistem Politik dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 karena dalam malakukan penelitian ini peneliti akan menganalisa mengenai Interaksi Antara Badan Permasyarakatan

Desa Dengan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti memerlukan cara atau metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisa data yang sesuai dengan permasalahan serta dapat dipercaya kebenarannya. Metode dalam teknik penulisan skripsi ini sangat diperlukan agar penelitian ini sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam ruang lingkup penulisan skripsi, pembahasan mengenai metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggambarkan peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi. Adapun pembahasan mengenai metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan atau Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. (Sugiyono, 2016)

Penelitian berjudul Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir metode ini akan diteliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan lataralami dengan maksud menafsirkan fenomena yang sedang terjadi dan

melibatkan berbagai metode yang ada. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif sebuah penelitian yang dibuat dengan tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta mampu memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena secara objektif.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dimana seorang Penulis memperoleh data tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data antara lain :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pengamatan yang dilakukan dengan cara mewawancarai pemerintah desa anggota BPD dengan masyarakat yaitu tokoh pemuda, tokoh agama, lansia, warga berkebutuhan khusus, tenaga kesehatan desa, ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian, pengurus TK/TPA di Desa Bakung.

Adapun sumber data yang telah peneliti dapatkan bisa dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 1. Sumber data Narasumber

No	Narasumber	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	Pemerintah Desa	1	-	1
2	BPD	-	2	2
3	Tokoh Agama	-	2	2
4	Pemuda	3	3	6
5	Tenaga Kesehatan Desa	1	-	1
6	Ibu-ibu PKK	3	-	3

7	Ibu-ibu Pengajian	2	-	2
8	Lansia	5	1	6
9	Pengurus TK/TPA	2	-	2
10	Warga Berkebutuhan Khusus	1	1	2
Jumlah		18	9	27

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan serta sebagai data pendukung dari sumber data utama, agar penelitian memiliki hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Sumber didapatkan dari berbagai buku, jurnal, internet, berita lain yang berhubungan dengan penelitian interaksi antara badan permusyawaratan desa dengan masyarakat dalam proses penyerapan aspirasi di desa bakung kecamatan indralaya utara kabupaten ogan ilir.

Setelah itu dari sumber data yang telah didapatkan peneliti, maka peneliti melakukan pengolahan dan analisis data agar bisa menjawab permasalahan pada penelitian ini. Yaitu bagaimana proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti akan menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi dan Observasi. Untuk permasalahan yang tidak terjawab dengan teknik wawancara maka peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi, dan jika data teknik dokumentasi tidak terjawab maka peneliti pun akan melengkapinya dengan teknik observasi.

a. Wawancara

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik wawancara sebagai cara utama untuk mengumpulkan data atau sebuah informasi. Wawancara yang dilakukan peneliti bersifat terstruktur yang dilakukan harus menetapkan masalah dari pertanyaan yang akan diberikan ketika proses wawancara sedang berlangsung.

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung dua arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Sebelum memulai wawancara mendalam agar mendapatkan informasi yang diperlukan, maka peneliti menggunakan pembicaraan informal terlebih dahulu agar terjalin komunikasi yang baik dan menimbulkan timbal balik antara peneliti dengan yang akan diwawancarai selain itu, peneliti juga berpegang pada pedoman yang disusun sebelumnya. Pada penelitian ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan wawancara yang bersifat terpimpin sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan saat proses wawancara sedang berlangsung, karena akan mempermudah untuk mendapatkan data secara mendalam.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam penelitian. Observasi berarti memperhatikan dan mengamati lebih spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan obyek kajian penelitian.

Observasi dalam penelitian ini adalah mengobservasi bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD di Desa Bakung. Jadi, apabila dokumen-dokumen itu tidak ada maka untuk memperkuat penelitian ini diganti dengan observasi untuk membuktikan itu berdasarkan wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya, monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya, karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya, foto, sketsa, gambar hidup dan lain-lain. (Hoeve, 2007)

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen persoalan masyarakat dalam Proses Penyerapan Aspirasi masyarakat Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto, surat dan dokumen yang akan menjadi data dalam penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam Penelitian ini peneliti memilih di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara sebagai tempat penelitian. Alasannya karena untuk mengetahui bagaimana Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung

Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Karena masyarakat Desa Bakung sangat peka terhadap Badan Permusyawaratan Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat dari tahun-ketahun hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui reaksi dan prespektif masyarakat Desa Bakung terhadap Badan Permusyawaratan Desa.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data disebut sebagai suatu cara dalam mengolah data dan menafsirkan data, analisa data merupakan sebuah kegiatan penelaahan, pengelompokan, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena ini memiliki nilai sosial akademis bahkan ilmiah. Kegiatan yang tersusun dalam analisis data seperti menggolongkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data berdasarkan variabel dan jenis responden, serta menyajikan data berdasarkan variabel yang diteliti. (Mamik, 2015)

a. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, perubahan data kasar yang muncul dari catatan-catatan peneliti yang didapatkan di lapangan. (Albi, 2018)

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan mengelompokkan data-data yang telah didapat dengan cara membaginya ke dalam dua kelompok besar yaitu data hasil wawancara dengan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) desa bakung dan data hasil wawancara dengan masyarakat yaitu tokoh pemuda, tokoh agama, lansia, warga berkebutuhan khusus, tenaga kesehatan desa, ibu-ibu PKK,

ibu-ibu pengajian, pengurus TK/TPA. Itulah yang disebut dengan reduksi data atau pengelompokan data untuk mendapatkan informasi yang akurat.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah memaparkan data-data atau sekumpulan informasi yang telah disusun dengan tujuan memberikan gambaran keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian dan bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dalam melakukan pengambilan tindakan penyajian data dalam penelitian bisa berbentuk teks naratif dan kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi dimasa lalu. (Yusuf, 2014)

Setelah peneliti mengelompokkan data ke dalam kelompok masing-masing maka peneliti melakukan langkah penyajian data, langkah penyajian data itu adalah data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelompoknya masing-masing dan diurutkan berdasarkan urutan-urutan yang di butuhkan dalam penelitian ini. Kemudian setelah itu peneliti akan menyajikan data-data ke dalam penulisan skripsi.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2016)

Tahap analisis peneliti akan melakukan analisis data terhadap pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, data-data tersebut dianalisa satu persatu, data dari hasil wawancara adalah data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) desa bakung dan dari masyarakat yaitu tokoh pemuda, tokoh agama, lansia, warga berkebutuhan khusus, tenaga kesehatan desa, ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian, pengurus TK/TPA. Observasi data yang diperoleh peneliti dari mengamati langsung mengenaiapa yang sedang berlangsung atau sudah terjadi dan Data dokumentasi adalah data yang berupa foto, surat dan dokumen yang didapatkan peneliti kemudian peneliti akan membedakan data-data tersebut dan dianalisa satu persatu.

Dilihat dari sudut pandang teori yang peneliti gunakan yaitu teori perwakilan atau representasi dalam Menganalisa data yang di peroleh, hal tersebut sama dengan teori perwakilan atau representasi yang dijelaskan oleh Anthony H. Birch yang mana menurut Anthony H. Birch teori perwakilan atau representasi adalah teori yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki tugas yang diakui untuk membela atau memajukan kepentingan tertentu yang ditentukan oleh prinsipalnya, duduknya seseorang di dalam lembaga perwakilan dipandang mewakili keseluruhan kehendak atau aspirasi orang yang memberikan mandat.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi atau telah disajikan. Pada tahap ini peneliti bertugas untuk menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini berisi deskripsi atau gambaran dari permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyimpulan tersebut.

Langkah terakhir dari suatu analisis adalah penarikan kesimpulan, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dari awal penelitian dan peneliti telah mencatat serta memberi makna mengenai sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan gambaran permasalahan yang akan peneliti lakukan sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam menyimpulkan tentang Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dan peneliti mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. (Yusuf, 2014).

H. Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam menyusun penelitian ini, maka dalam hal ini peneliti perlu memberikan deskripsi pada tulisan ini yang dikemukakan terlebih dahulu sistematika dan penyusunan secara keseluruhan secara garis besarnya penelitian ini terdiri dari Lima bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan secara singkat tentang pembahasanyang berhubungan dengan penelitian. Pendahuluan terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah. Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, sistematika penulisan dan daftar pustaka serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan lokasi penelitian yang digunakan. Bab ini menjadi dasar dalam pembuatan skripsi yang berjudul Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

Dalam bab ini secara khusus peneliti menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, berbeda dengan Bab I pada bab ini peneliti fokus pada kajianpustaka masalah yang diangkat.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bakung, pada bab ini peneliti akan menganalisa tentang Interaksi

Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas tentang hasil dan data yang telah peneliti dapat dari proses pengumpulan data dan proses analisis data. Penulisan dan pembahasan ini ditentukan dari rumusan masalah dan teorinya. Maka pada Bab ini peneliti menyajikan hasil dan pembahasan tentang Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini penulis menyimpulkan seluruh data yang telah diperoleh dari penelitian dan menyampaikan saran dari penelitian mengenai Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.